



Bengkulu, hariandialog.com– 15-3-2018 - Nasib anak-anak yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidaklah semanis anak-anak yang bebas hidup ditengah masyarakat. Anak-anak yang terjebak masalah hukum harus kehilangan masa terindah dalam kehidupan di usia mereka.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu yang selama ini sebagai pendamping merasakan sendiri bagaimana nasib anak-anak yang dipidana penjara, ironisnya orang tua sang anak berstatus napi ada yang tidak peduli anaknya yang dipenjara.

Pendampingan kemanusiaan yang sudah dilakukan PKBI selama ini membuat mereka tidak menyerah, meski pendampingan yang dilakukan tidak banyak diketahui publik. Untuk lebih menggaungkan pendampingan dan permasalahan yang di hadapi anak-anak narapidana, PKBI Bengkulu mengajak media untuk terlibat dan menyiarkan secara luas yang intinya agar anak-anak berstatus narapidana (napi) dapat diterima kembali secara setara seperti anak-anak lain ditengah keluarga dan ditengah masyarakat luas. Saat ini tercatat di PKBI Bengkulu anak-anak yang berstatus narapidana di Lapas Bentiring berjumlah 81 anak.

Karena PKBI sebagai pendampingan advokasi anak, berupa menghapus pandangan masyarakat yang menganggap anak AMPP sebagai pelaku kejahatan kriminal memberikan label sampah masyarakat? yang tidak berguna dan wajar untuk dipidana. Diungkap koordinator PKBI Bengkulu, Anton didampingi Febri saat berdialog dengan anggota dan pengurus PWI provinsi Bengkulu di sekretariat PKBI jalan Kapuas Padang Harapan Kamis(15/3). Untuk mengatasi stigma dan labeling kepada AMPP maka diperlukan keterlibatan semua pihak khususnya media. Agar adanya penerimaan sosial kepada AMPP, publikasi media bisa

berpengaruh misal prestasi dan aktivitas positif yang dilakukan napi anak selama menjalani pembinaan di Lapas, sehingga bisa memperkuat penerimaan dilingkungan sosial secara setara tanpa pengucilan.

Hadir Sekjen PWI Drs. Syahyar Syahbudin dan anggota PWI, lanjut Anton sejak dibentuk PKBI secara nasional menangani banyak program diantaranya, program remaja berupa pusat informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi (PIPR). Yang tujuannya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja terhadap kesehatan reproduksi, PMS dan HIV/AIDS. Dalam konteks penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH). PKBI Bengkulu mengambil peran dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan sebagai upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan kapasitas bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH). Khususnya anak yang menjalani pidana penjara (AMPP), yang ada di LPKA kelas IIA Kota Bengkulu dan Lapas kelas IIA Curup RL.

MoU dengan Kanwil KemenkumHAM Bengkulu tahun 2011, PKBI memberikan dukungan untuk membina anak-anak yang ada di Lapas. Agar tetap mendapatkan prioritas sehingga kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud sesuai amanah UU N0.35/2014 tentang perlindungan anak dan UU N0.11/2012 tentang sistem Peradilan Anak (SPPA). Dukungan yang diberikan berupa kegiatan diskusi, konseling, akses layanan kesehatan, layanan pendidikan dan ketrampilan serta akses layanan hak identitas. Permasalahan anak

Hasil dialog dan diskusi PKBI dengan PWI merekomendasikan 10 poin diantaranya, wartawan peliput diberi a. identitas khusus b. Pertemuan skala besar melibatkan OPD dan stake holder terkait c. Pertemuan dan penyuluhan orang tua anak napi d. Memperjuangkan anak bermasalah hukum tetap menjalani pendidikan khususnya yang hukumannya dibawah tiga bulan e. Menyiapkan dan memfungsikan rumah singgah bagi anak f. Mendata dan mengawasi anak mantan napi agar terus dibina, g. Jadwal pembinaan yang terus menerus, h. Memberi peluang anak-anak mantan napi agar bisa berbaur dan beraktivitas wajar ditengah masyarakat i. Menyiapkan anggaran publikasi/advertorial di media massa. **(hasanah)**